

RISALAH RAPAT

JENIS RAPAT : RAPAT KERJA BANGGAR DAN TAPD
HARI, TANGGAL : SELASA, 27 MEI 2025
TEMPAT : RUANG RAPAT KHUSUS DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
JAM : 10.00 WIB – SELESAI
TEMA RAPAT : PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN
2024

- I. RAPAT DIPIMPIAN OLEH
 1. RULIYONO, SH
 2. Hj SITI MAFROCHATIN NI,MAH,S.Pd,MM
 3. MICHAEL EDY HARIYANTO,SH, MH

- II. ANGGOTA YANG HADIR :
 1. Ir HJ YAYUK BANAR SRI PANGAYOM
 2. PATEMO
 3. AHMAD MASROHAN
 4. H MUHAMMAD ALI MAHRUS, SH, MH
 5. ARVY RIZALDY, SE
 6. EMY WAHYUNI DWI LESTARI
 7. A TAUFIK
 8. RICCY ANTAR BUDAYA,SH,M.Kn
 9. MARIFATUL KAMILA, SH
 10. EVA HESTIAWATI, SE
 11. SUWITO
 12. ABDUL GHOFUR
 13. Hj RATIH NURHAYATI
 14. I GEDE SUDRO WICANO
 15. FEBRI PRIMA SANJAYA

- III. STAKEHOLDER YANG DIUNDANG HADIR ;

ketua dan anggota TAPD Kabupaten Banyuwangi

- IV. JALANNYA RAPAT ;
 - Pimpinan Rapat, membuka pelaksanaan rapat
 - Pimpinan rapat menyampaikan prolog, Maksud dan tujuan Rapat ;
 - Pimpinan Rapat juga mestresing terkait Pokok pokok Pikiran DPRD, yang menjadi hak DPRD sebagai wujud pelaksanaan undang -undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, ini merupakan Hak yang dijamin konstitusi
 - Bahwa Pokok pokok pikiran DPRD merupakan bagian pemeritahuan pelaksanaan pembangunan yang justru dipandang lebih aspiratif karena didapatkan melalui kegiatan kunjungan kerja, pengawasan maupun hasil kegiatan jaring aspirasi melalui RESES DPRD , oleh sebab itu agar menjadi atensi eksekutif untuk dapay direalisasi
 - Selanjutnya pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada TAPD untuk menanggapi pertanyaan atau permintaan tambahan penjelasan anggota Banggar pada rapat terdahulu

- Ketua TAPD / Sekretaris Daerah ;
 - membacakan ulang tanggapan, pertanyaan maupun permintaan penjelasan anggota Banggar pada rapat terdahulu serta memberikan kesempatan anggota TAPD /masing masing kepala SKPD terkait untuk memberikan tanggapan/ jawaban maupun tambahan penjelasan
- Kepala BPKAD - BAPPENDA
 - Terhadap pertanyaan Ibu Hj Ir Hj Yayuk Banar Sri Pangayom; dijelaskan bahwa terhadap beberapa aset mangkrak atau tidak produktif apa langkah eksekutif yang akan maupun sedang ditempuh adalah telah dan akan terus dilakukan evaluasi serta melakukan validasi data aset, khususnya aset yang memiliki nilai ekonomi produktif, mengupayakan promosi secara progresif seperti penyewaan gedung, lahan dan perjanjian pemanfaatan yang bernilai ekonomi dengan pihak ketiga, seperti pengelolaan Hotel Blambangan, Dermitori maupun aset lainnya
- SEKDA - BAPPEDA
 - Sangat sependapat terhadap saran masukan Pak ARVY RIZALDY, bahwa Berbicara Pertanggungjawaban APBD sebenarnya tidak hanya berbicara angka angka, namun sejatinya kita berbicara tentang seberapa nilai kemampaan APBD terhadap dampak kesejahteraan masyarakat kita, oleh karena itu yang kita ukur adalah apakah angka angka APBD tersebut memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi Banyuwangi, Oleh sebab itu orientasi pembangunan yang sedang dan akan kita laksanakan selalu berorientasi pada sebagaimana RPJMD yang sudah kita sepakati, dengan mengukur kemampuan anggaran secara terukur melalui target target yang kita tetapkan sehingga anggaran benar benar memberikan benfid / output – outcome pada kesejahteraan masyarakat
- DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA – BPKAD
 - Disampaikan terimakasih atas saran masukan Pak RICCY ANTAR BUDAYA, bahwa eksekutif sangat sependapat untuk meningkatkan perhatian terhadap bidang kepemudaan dan olah raga, beberapa kekutangan dukungan terhadap sarana olah raga akn kita cukupi dalam waktu mendatan, adapun pembinaan atlet akan kita lakukan melalui penguatan kelembagaan KONI dengan anggaran sesuai kemampuan APBD kita, kita juga sudah dan akan terus memberikan pembinaan maupun memberikan reward kepada atlet yang berprestasi, baik ditingkat Daerah PORPROV maupun di tingkat Nasional maupun regional
- BAPPEDA
 - Menyampaikan terimakasih atas saran terkait penyusunan Dokumen Raperda pertanggungjawaban, eksekutif akan melakukan lebih teliti dan cermat
- ABDUL GHOFUR
 - Menyampaikan pendapat dan mohon tanggapan , bahwa Infrastruktur jalan dan penerangan jalan merupakan prasarana kelabcaran mobiltas barang dan jasa, juga meruakan sarana utama keberangsungn penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal, mohon ada perhatian lebih terhadap beberapa ruas jalan khususnya di wilayah pelosok pedesaan yang masih sangat buruk dan tanpa penerangan jalan
- BPKAD – BAPENDA
 - Bahwa tidak bisa dipungkiri ketergantungan APBD kita sampai dengan saat ini masih sangat besar terhadap bantuan pemerintah pusat, artinya bahwa kekuatan fiskal kita masih sangat lemah, PAD kita ada pada posisi kurang lebih 20 % dari APBD kita, potensi pendapatan asli Daerah kita bertumpu pada Pajak dan retribusi daerah, sebagaimana data bahwa perolehan Pendapatan Asli Daerah kitapada sektor pajak cukup baik, rata rata diatas 100 %, diakui memang untuk retribusi kita masih sangat

rendah, oleh karena itu perlu dukungan bersama atas langkah langkah maupun upaya peningkatan retribusi sebagai strategi penguatan Fiskal Daerah

- Adapun upaya yang akan terus kita lakukan pada tahun mendatang antara lain mempercepat pemasangan teks monitor atas pajak dan retribusi daerah, penguatan SDM dan pemanfaatan Digitalisasi serta kemudahan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi Daerah
- Pimpinan Rapat (RULIONO, SH)
- Memberikan saran masukan , agar dalam meningkatkan PAD eksekutif tidak hanya melaksanakan langkah langkah yang tidak populis hanya bertumpu pada perolehan Pajak maupun retribusi, langkah langkah progresif dan berani harus ditempuh , pajak dan retribusi jangan sampai menambah beban ekonomi rakyat yang saat ini juga tidak sedang baik baik saja perekonomiannya ;
 - Langkah progresif dan berani tersebut telah kita jembatani dengan dibentuknya Perda tentang BUMD yang seharusnya menjadi landasan hukum dalam inovasi dan kreatifitas eksekutif untuk melakukan eksplorasi penerimaan Pendapatan daerah, misalnya dengan melakukan kajian ulang atas Usaha kelautan/ Kapal , PUDAM melakukan ekspansi usaha bidang Air kemasan atau pendirian BUMD yang tidak hanya berorientasi layanan masyarakat

KESIMPULAN RAPAT

- Secara Substansi materi Raperda Pertanggungjawaban APBD telah memenuhi norma hukum ;
- Beberapa catatan penting yang menjadi atensi Badan anggaran akan dilakukan perbaikan atau ditindaklanjuti pada tahun anggaran kedepan
- Banggar sepakat secara akutansi bahwa angka angka yang telah disampaikan oleh TAPD telah juga dilakukan audit oleh BPK RI di Jawa Timur, dimana rekomendasinya DPRD juga telah menerima serta melakukan kajian bersama dalam rapat pimpinan maupun dalam rapat pembahasan ditingkat fraksi maupun komisi
- Angka angka dimaksud antara lain meliputi penyandingan angka target dan realisasi sebagaimana dilampirkan pada neraca Pertanggungjawaban APBD
- Rapat Banggar diakhiri pada pukul 15. 00 Wib

BANYUWANGI, 27 MEI 2025

PIMPINAN RAPAT ,



RULIONO, SH

SEKRETARIS BADAN ANGGARAN,



ALIEF RACHMAN KARTIONO, S.E., M.M

RISALAH RAPAT

JENIS RAPAT : RAPAT KERJA BANGGAR DAN TAPD
HARI, TANGGAL : SENIN, 26 MEI 2025
TEMPAT : RUANG RAPAT KHUSUS DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
JAM : 10.00 WIB – SELESAI
TEMA RAPAT : PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN
2024

I. RAPAT DIPIMPIAN OLEH
RULIYONO, SH

II. ANGGOTA YANG HADIR :

1. Ir HJ YAYUK BANAR SRI PANGAYOM
2. PATEMO
3. H MUHAMMAD ALI MAHRUS, SH, MH
4. ARVY RIZALDY, SE
5. EMY WAHYUNI DWI LESTARI
6. RICCY ANTAR BUDAYA, SH, M.Kn
7. MARIFATUL KAMILA, SH
8. EVA HESTIAWATI, SE
9. SUWITO
10. ABDUL GHOFUR
11. Hj RATIH NURHAYATI
12. I GEDE SUDRO WICANO

III. STAKEHOLDER YANG DIUNDANG HADIR ;

ketua dan anggota TAPD Kabupaten Banyuwangi

IV. JALANNYA RAPAT ;

- Pimpinan Rapat, membuka pelaksanaan rapat
 - Pimpinan rapat menyampaikan prolog, Maksud dan tujuan Rapat ;
 - Disampaikan terimakasih kepada eksekutif yang telah menyampaikan dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tepat waktu sebagaimana ketentuan regulasi, sehingga Badan Musyawarah menjadwalkan pembahasan sebagaimana mestinya
 - Pimpinan Rapat atas nama DPRD juga menyampaikan apresiasi atas raih berbagai macam prestasi dan penghargaan pemerintah Banyuwangi dalam beberapa hal , khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran seperti prestasi WTP atas LKPD oleh BPK , hal ini dapatnya terus dipertahankan dan ditingkatkan
 - Rapat pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 hendaknya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sejauh mana progres pelaksanaan pembangunan – layanan masyarakat maun pelaksanaan pemerintahan dalam tahun anggaran 2024, sejauhmana efektifitas anggaran terhadap dampak perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
 - Rapat hari ini hanya dengan agenda penyampaian paparan oleh TAPD atas substansi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 ,

- Selanjutnya pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada TAPD untuk menyampaikan paparannya;
- Ketua TAPD / Sekretaris Daerah ; menyampaikan kisi kisi / hal hal pokok substansi Raperda antara lain '
 - Bahwa momentum penyampaian dan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 selain sebagai momentum evaluasi terukur terhadap esensi pelaksanaan Pembangunan juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - Ketua TAPD juga menyampaikan informasi atas perolehan **opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan ;

Eksekutif berkomitmen akan terus meningkatkan akuntabilitas guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
 - Disampaikan juga bahwa Banyuwangi juga ditetapkan sebagai daerah dengan status "Kinerja Tinggi" dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Penilaian LPPD merupakan mekanisme tahunan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja Pemerintah Daerah. Cakupan evaluasi mencakup beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
 - Selanjutnya disampaikan Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar 3,37 triliun rupiah dari target anggaran sebesar 3,30 triliun rupiah, atau sebesar 102,40 persen, yang terinci sebagai berikut:
 1. Pendapatan asli daerah terealisasi sebesar 597,54 miliar rupiah dari target anggaran sebesar 630 miliar rupiah, atau sebesar 94,85 persen, yang terdiri dari
 - a. Pajak daerah terealisasi sebesar 298,51 miliar rupiah dari target anggaran sebesar 273,40 miliar rupiah, atau sebesar 109,18 persen;
 - b. Retribusi daerah terealisasi sebesar 263,96 miliar rupiah dari target anggaran sebesar 300,97 miliar rupiah, atau sebesar 87,70 persen;
 - c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 23,77 miliar rupiah dari target anggaran sebesar 24,95 miliar rupiah, atau sebesar 95,29 persen;
 - d. Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar 11,30 miliar rupiah dari target anggaran sebesar 30,68 miliar rupiah, atau sebesar 36,84 persen.
 2. Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Banyuwangi terealisasi sebesar 104,18 persen dari target anggaran dengan nominal realisasi senilai 2,72 triliun rupiah yang terdiri dari :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan terealisasi sebesar 2,15 triliun rupiah dari anggaran sebesar 2,11 triliun rupiah, atau sebesar 101,72 persen;
 - b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya terealisasi sebesar 281,98 miliar rupiah dari anggaran sebesar 278,16 miliar rupiah atau sebesar 101,37 persen;

- c. Transfer Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar 287,23 miliar rupiah dari target anggaran sebesar 218,09 miliar rupiah, atau sebesar 131,70 persen.
- 3. Lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar 53,56 miliar rupiah dari target anggaran sebesar 51,35 miliar rupiah, atau sebesar 104,31 persen yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan hibah terealisasi sebesar 2,85 miliar rupiah dari anggaran sebesar 100 juta rupiah;
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terealisasi sebesar 50,71 miliar rupiah dari target anggaran sebesar 51,25 miliar rupiah.

- Ketua TAPD juga menyampaikan bahwa belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar 3,32 triliun rupiah dari pagu anggaran sebesar 3,73 triliun rupiah atau terealisasi sebesar 89 persen, yang terinci sebagai berikut :

1. Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial terealisasi sebesar 2,37 triliun rupiah dari pagu anggaran sebesar 2,59 triliun rupiah, atau sebesar 91,47 persen;
2. Belanja modal yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal Aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya terealisasi sebesar 527,99 miliar rupiah dari pagu anggaran sejumlah 701,65 miliar rupiah, atau sebesar 75,25 persen;
3. Belanja tak terduga selama tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar 465,33 juta rupiah dari pagu anggaran sejumlah 20 miliar rupiah, atau sebesar 2,33 persen;
4. Transfer terdiri dari bagi hasil dan bantuan keuangan terealisasi sebesar 421,09 miliar rupiah dari anggaran sebesar 417,27 miliar rupiah, atau sebesar 100,92 persen. Sehingga per 31 Desember 2024 terjadi surplus sebesar 51,95 miliar rupiah, yang merupakan hasil dari realisasi pendapatan daerah dikurangi dengan realisasi belanja dan transfer daerah.

- Selanjutnya juga disampaikan bahwa pos penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar 37,27 miliar rupiah dari anggaran sebesar 437,27 miliar rupiah atau sebesar 8,52 persen, sedangkan anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan bernilai nol rupiah.

Jumlah realisasi pembiayaan netto sebesar 37,27 miliar rupiah, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar 89,21 miliar rupiah, yang merupakan hasil penjumlahan surplus anggaran dengan pembiayaan netto.

- Adapun posisi keuangan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Nilai aset daerah tahun 2024 sebesar 5,15 triliun rupiah yang terdiri dari :

- a) Nilai aset lancar sebesar 287,85 miliar rupiah yang terdiri dari nilai keseluruhan kas sebesar 89,31 miliar rupiah, jumlah persediaan sebesar 110,88 miliar rupiah, beban dibayar dimuka senilai 1,17 miliar rupiah serta jumlah piutang daerah sebesar 172,36 miliar rupiah dengan nilai penyisihan piutang daerah sebesar 85,86 miliar rupiah;

- b) Nilai investasi jangka panjang daerah tahun 2024 sebesar 249,09 miliar rupiah;

- c) Aset tetap daerah tahun 2024 yang terdiri dari aset tanah, aset peralatan dan mesin, aset gedung dan bangunan, aset jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan sebesar 11,33 triliun rupiah dengan nilai akumulasi penyusutan aset tetap sebesar 7,10 triliun rupiah sehingga nilai aset tetap bersih tahun 2024 sebesar 4,23 triliun rupiah;
 - d) Properti Investasi tahun 2024 senilai 150,72 miliar rupiah dengan nilai akumulasi penyusutan properti investasi sebesar 15,66 miliar rupiah sehingga nilai properti investasi bersih tahun 2024 sebesar 135,07 miliar rupiah;
 - e) Jumlah aset lainnya tahun 2024 yang terdiri dari kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain sebesar 260,96 miliar rupiah dengan nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud senilai 13,89 miliar rupiah sehingga nilai aset lainnya bersih tahun 2024 sebesar 247,07 miliar rupiah.
- 2) Jumlah kewajiban daerah tahun 2024 sebesar 295,15 miliar rupiah yang terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga sebesar 95,42 juta rupiah, pendapatan diterima dimuka sebesar 561,90 juta rupiah, utang belanja sebesar 290,65 miliar rupiah dan utang jangka pendek lainnya sebesar 3,85 miliar rupiah.
- 3) Jadi Nilai ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sebesar 4,86 triliun rupiah, yang merupakan selisih antara nilai aset daerah dengan kewajiban daerah.
- Pimpinan Rapat menghentikan Jalannya Rapat untuk memberikan kesempatan ibadah Sholat Duhur ;
 - Pimpinan Rapat membuka lagi Rapat Pembahasan dan memberikan kesempatan kepada perwakilan anggota fraksi yang ada di Banggar untuk mengajukan pertanyaan, klarifikasi atau konfirmasi lain mengenai substansi materi
 - Ir Hj YAYUK BANAR SRI PANGAYOM
 - Mohon tambahan penjelasan terhadap beberapa aset mangkrak atau tidak produktif apa langkah eksekutif ng akan tempuh
 - ARVY RIZALADY, SE
 - Memberikan stresing, bahwa Berbicara Pertanggungjawaban APBD sebenarnya tidak hanya berbicara angka angka, namun sejatinya kita berbicara tentang seberapa nilai kemampaatan APBD terhadap dampak kesejahteraan masyarakat kita, oleh karena itu yang kita ukur adalah apakah angka angka APBD tersebut memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi Banyuwangi
 - RICCO ANTAR BUDAYA, SH,M.Kn
 - Terhadap substansi Raperda tidak menjadi persoalan, hanya saja memohon agar ada perhatian lebih terhadap kepentingan kepemudaan seperti sarana dan prasarana olah raga, contohnya kurangnya perhatian terhadap fasilitas olah raga , mohon tanggapan
 - MARIFATUL KAMILA, SH
 - Menyampaikan saran agar penyusunan Dokumen Raperda pertanggungjawaban tidak terkesan copy paste, mohon diteliti lagi masih ada angka angka maupun redaksi yang perlu pencermatan eksekutif
 - ABDUL GHOFUR
 - Menyampaikan pendapat dan mohon tanggapan , bahwa Infrastruktur jalan dan penerangan jalan merupakan prasarana kelabcaran mobiltas barang dan jasa, juga meruakan sarana utama keberangsungn penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal, mohon ada perhatian lebih terhadap beberapa ruas jalan khususnya di wilayah pelosok pedesaan yang masih sangat buruk dan tanpa penerangan jalan

➤ Hj RATIH NURHAYATI, ST

- Mohon tanggapan, bahwa berbicara pembangunan tentu harus diiringi dengan perencanaan keuangan yang berimbang, ada beberapa capaian kinerja keuangan khususnya pada sektor pendapatan Daerah (khususnya pada Retribusi Daerah) yang capaiannya masih sangat rendah, seperti apa perencanaan eksekutif dalam rangka optimalisasi pendapatan Asli Daerah kita

KESIMPULAN RAPAT

- Permintaan tambahan penjelasan, pertanyaan maupun konformasi Anggota Banggar akan ditanggapi oleh TAPD pada kesempatan Rapat berikutnya .
- Rapat Banggar diakhiri pada pukul 15. 40 Wib

BANYUWANGI, 26 MEI 2025

PIMPINAN RAPAT ,



RULYONO, SH

SEKRETARIS BADAN ANGGARAN,



ALIEF RACHMAN KARTIONO, S.E, M.M